

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 1876  
KUHPERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
NOTARIS**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Tina Diarti. M  
210710020**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2025**

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 1876  
KUHPERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
NOTARIS**

**SKRIPSI**



**Oleh:  
Tina Diarti. M  
210710020**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2025**

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 1876  
KUHPERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN  
NOTARIS**

**SKRIPSI**

**Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana**



**Oleh:  
Tina Diarti. M  
210710020**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS PUTERA BATAM  
TAHUN 2025**

## **SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Tina Diarti. M  
NPM/NIP : 210710020  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa "Skripsi" yang saya buat dengan judul:

### **ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 1876 KUHPERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

Adalah hasil karya sendiri dan bukan "duplikasi" dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan hasil penelitian yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun

Batam 28 Januari 2025

  
Tina Diarti/M  
210710020

**ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 1876  
KUHPERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi salah satu syarat  
memperoleh gelar Sarjana

Oleh:

Tina Diarti. M  
210710020

Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal

seperti tertera di bawah ini

Batam, 28 Januari 2025



Dr. Diki Zukriadi, S.H., M.H., M.Kn.  
Pembimbing



## ABSTRAK

Memungkiri tanda tangan merupakan tindakan bersifat imperatif sesuai Pasal 1876 KUHPerdata, yang berarti harus dilaksanakan dan tidak boleh diabaikan. Jika tanda tangan dipungkiri, sebuah akta dianggap gugur meskipun keberlakuannya bergantung pada keabsahan penandatanganannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aspek kepastian hukum Pasal 1876 KUHPerdata terkait pertanggungjawaban notaris terhadap legalisasi akta di bawah tangan serta mengetahui akibat hukum bagi para pihak dan notaris terhadap akta yang telah dilegalisasi berdasarkan Pasal 1876 KUHPerdata. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yang meninjau aspek-aspek hukum positif untuk mencapai kepastian dan keadilan. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa tindakan memungkiri menyebabkan hilangnya keabsahan akta di bawah tangan terkait ketidakpastian hukum mengenai pengakuan tanda tangan. Untuk mengurangi kemungkinan tersebut diperlukan legalisasi notaris yang berfungsi mengonfirmasi tanda tangan, yang penting bagi hakim dalam menilai keabsahan akta sebagai alat bukti. Meskipun akta di bawah tangan telah dilegalisasi notaris, potensi pemungkiran tanda tangan tetap ada. Jika pemungkiran terjadi setelah legalisasi, akta yang semula sah secara hukum kehilangan sebagian kekuatan pembuktianya dan menjadi bukti permulaan. Pemungkiran tanda tangan harus dilakukan secara tegas dan tanpa syarat. Jika satu pihak dirugikan akibat legalisasi notaris, dapat mengajukan tuntutan perdata serta gugatan pidana jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Kesimpulan penelitian ini adalah kepastian hukum akta di bawah tangan bergantung pada pengakuan tanda tangan. Jika tanda tangan dipungkiri, keabsahan dan eksistensi akta bisa lumpuh. Untuk mengurangi pemungkiran tanda tangan yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta, salah satu langkah yang dapat diambil adalah legalisasi notaris yang mengonfirmasi keabsahan tanda tangan, sehingga kepastian hukum akta lebih terjamin. Akibat hukum pemungkiran tanda tangan pada akta yang dilegalisasi notaris berdampak pada keabsahan akta, posisi pihak-pihak terkait, dan tanggung jawab notaris.

**Kata Kunci:** Memungkiri, Tanda Tangan, Legalisasi, Notaris

## ***ABSTRACT***

*Renouncing a signature is an imperative action in accordance with Article 1876 of the Civil Code, which means that it must be carried out and cannot be ignored. If the signature is denied, a deed is considered void even though its validity depends on the validity of the signature. The purpose of this study is to determine the legal certainty aspects of Article 1876 of the Civil Code related to the notary's responsibility for the legalization of deeds under the hand and to determine the legal consequences for the parties and the notary of the deed that has been legalized based on Article 1876 of the Civil Code. The method used is normative legal research, which reviews aspects of positive law to achieve certainty and justice. The results of this study indicate that the act of denying causes the loss of validity of the deed under the hand related to legal uncertainty regarding the recognition of signatures. To reduce this possibility, notarial legalization is required to confirm the signature, which is important for judges in assessing the validity of the deed as evidence. Even though the underhand deed has been legalized by a notary, the potential for signature suppression remains. If the omission occurs after legalization, the originally legally valid deed loses some of its evidentiary power and becomes preliminary evidence. The suppression of the signature must be done expressly and unconditionally. If a party is harmed as a result of notarial legalization, it can file a civil suit as well as a criminal suit if it is proven to have committed an unlawful act. The conclusion of this research is that the legal certainty of a deed under hand depends on the recognition of the signature. If the signature is denied, the validity and existence of the deed can be paralyzed. To reduce the denial of signatures that can eliminate the evidentiary power of the deed, one of the steps that can be taken is notarial legalization that confirms the validity of the signature, so that the legal certainty of the deed is more assured. The legal consequences of signature omission in a deed legalized by a notary affect the validity of the deed, the position of the parties involved, and the responsibility of the notary.*

***Keywords:*** Denial, Signature, Legalization, Notary

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjangkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan tugas akhir dengan judul **“ANALISIS YURIDIS KETENTUAN PASAL 1876 KUHPERDATA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG JABATAN NOTARIS”** yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program studi strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, penilaian dan masukan yang konstruktif senantiasa penulis terima dengan senang hati. Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari pula bahwa skripsi ini takkan terwujud tanpa bantuan, arahan, dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom., M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Bapak Dr. Michael Jibrael Rorong, S.T., M.I.Kom., CPS. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam;
3. Bapak Dr. Diki Zukriadi, S.H., M.H.. M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
4. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. CPM. selaku Dosen Pemimping Akademik Penulis di Universitas Putera Batam;
5. Semua Dosen dan Staff Universitas Putera Batam;
6. Kepada Ibu dan kedua kakak penulis yang selalu memberikan doa tiada henti, nasehat, dukungan, inspirasi, serta motivasi untuk kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Teman-teman se-angkatan dan teman-teman kerja penulis yang memberi semangat selama penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Semoga segala kebaikan dan bantuan yang diberikan, mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan, Amin. Demikianlah skripsi ini penulis susun dengan harapan

bisa memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

Batam, 28 Januari 2025



Tina Diarti. M



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL.....</b>	i
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	ii
<b>SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b>	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	iv
<b>ABSTRAK.....</b>	v
<b>ABSTRACT.....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI .....</b>	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	7
1.3. Batasan Masalah .....	8
1.4. Rumusan Masalah.....	8
1.5. Tujuan Penelitian.....	8
1.6. Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	11
2.1. Kerangka Teoritis .....	11
2.2. Kerangka Yuridis.....	21
2.3. Penelitian Terdahulu .....	27
2.4. Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	34
3.1. Jenis Penelitian .....	34
3.2. Metode Pengumpulan Data .....	34
3.3. Alat Pengumpulan Data .....	36
3.4. Metode Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	38
4.1. Hasil Penelitian.....	38
4.1.1 Aspek Kepastian Hukum Pasal 1876 KUHPerdata Terkait Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Legalisasi Akta Di Bawah Tangan .....	38
4.1.2 Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dan Notaris Terhadap Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Di Legalisasi Berdasarkan Pasal 1876 KUHPerdata.....	44
4.2. Pembahasan.....	47
4.2.1 Aspek Kepastian Hukum Pasal 1876 KUHPerdata Terkait Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Legalisasi Akta Di Bawah Tangan .....	47
4.2.2 Akibat Hukum Bagi Para Pihak Dan Notaris Terhadap Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Di Legalisasi Berdasarkan Pasal 1876 KUHPerdata.....	51
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	55
5.1. Simpulan .....	55
5.2. Saran .....	57

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>63</b>
Lampiran 1. Pendukung Penelitian.....	63
Lampiran 2. Daftar Riwayat Hidup .....	65
Lampiran 3. Surat Keterangan Penelitian .....	66